

DPRD Kota Bogor Dorong Pemkot Tangani Kemiskinan dan Pengangguran

BOGOR (IM) - Ketua DPRD Kota Bogor, Jawa Barat, Atang Trisnanto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menyusun program kerja 2025 yang fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan dan pengangguran.

Atang di Kota Bogor, Selasa (26/3), memberikan catatan dan masukan kepada Pemkot Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.

"Sesuai dengan esensi pembangunan daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah," ujarnya.

Menurut Atang, pembangunan Kota Bogor yang telah mampu menghadirkan berbagai kenyamanan dan ketersediaan fasilitas publik, perlu diikuti dengan esensi utama pembangunan yang

mampu mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat. Dari hasil reses maupun turun wilayah bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, pihaknya menemukan banyak keluhan dan temuan tentang sulitnya ekonomi masyarakat.

"Di wilayah, kami menemukan banyak pengangguran dan keluhan tentang sulitnya ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Bappeda harus mampu menangkap masalah mendasar ini dan menuangkannya dalam program pembangunan ke depan," kata Atang.

Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, Atang mengatakan program yang perlu dijadikan skala prioritas antara lain peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan ekonomi kreatif, pembentukan pusat ekonomi baru, dan penguatan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). ● jai

Siti Chomzah Ajak Kepala PAUD Optimalkan Gerakan Transisi PAUD SD

BOGOR (IM) - Pj. Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Siti Chomzah menegaskan bahwa gerakan masa transisi PAUD ke SD memiliki tujuan mulia yang memastikan setiap anak memiliki pondasi sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan pondasi yang baik, yang dapat melahirkan generasi emas Indonesia pada 2045 mendatang.

Hal itu dijelaskan Siti Chomzah saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesiapan Bersekolah Kepala Pendidikan Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Bogor, di Hotel New Ayuda Cisarua, Senin (25/3).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan telah melakukan langkah agar masa transisi PAUD yang menyenangkan ini berjalan sukses, yaitu melakukan sosialisasi, workshop, bimtek, membuat forum komunikasi PAUD-SD yang be-

ranggotakan mulai Penilik, Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, Komite, Orang tua pada PAUD dan SD, serta edaran Kepala Dinas tentang masa transisi PAUD ke SD yang isinya di antaranya dilarang melakukan tes baca tulis hitung (calistung) pada saat PPDB SD, masa pengenalan lingkungan sekolah pada SD selama dua minggu, dan pendampingan guru SD kelas awal.

Selanjutnya, Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas, Siswanto mengungkapkan, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk memberikan penguatan kepada satuan pendidikan PAUD tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.

"Kegiatan ini diikuti sekitar 266 Kepala PAUD se-Kabupaten Bogor yang terbagi dalam dua angkatan yang dilaksanakan dari 25-29 Maret 2024," tandas Siswanto. ● gio



Siti Chomzah mengharapkan PAUD-SD se Kabupaten Bogor bisa melahirkan generasi emas 2045.

DPKPP Kab. Bogor Ungkap Kronologis TPBU Yayasan Sinar Bumi Belum Berizin

CIBINONG (IM) - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor buka suara terkait pembukaan segel di Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Yayasan Sinar Bumi di wilayah Kecamatan Jonggol.

Kabid Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) DPKPP Kabupaten Bogor, Nunung Toyibah menerangkan terkait TPBU Yayasan Sinar Bumi di Jonggol benar adanya dan sedang proses perizinan.

"TPBU Jonggol yang pernah disegel Satpol PP, memang itu belum tuntas perizinannya," terang Nunung Toyibah kepada wartawan, Selasa (26/3).

Selain itu, tutur Nunung

Toyibah pihaknya mendapat informasi kalau ada masalah internal juga, tetapi pihaknya hanya fokus dalam proses perizinannya.

"Sampai saat ini belum berlanjut proses perizinannya, karena ada konflik internal, dan berprosesnya sudah lama itu," tuturnya.

Dia beranggapan alasan Satpol PP Kabupaten Bogor menyetel mungkin karena ada masalah, yaitu TPBU Yayasan Sinar Bumi belum mengantongi perizinan.

"Meskipun begitu, untuk izinnya belum tuntas dan harus bisa dibereskan oleh Yayasan Sinar Bumi," ungkapnya.

Nunung menjelaskan bahwa sesuai dokumen memang sudah ada beberapa perizinan terbit, dan itu makam sudah lama berdiri, hanya ada penambahan luasan area lahan TPBU saja.

"Sebenarnya yang sedang berproses itu balik nama, karena orang tuanya sudah meninggal dan ada sengketa keluarga. Secara aturan untuk TPBU memang harus badan hukum, dan tidak boleh nama pribadi atau perorangan," jelas Nunung Toyibah. ● gio

8 | Nusantara



ARMADA UNTUK MUDIK DI TERMINAL CICAHEUM
Bus antar kota antar provinsi terparkir di Terminal Cicaheum, Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/3). Jelang masa angkutan Idul Fitri 2024, Terminal Cicaheum menyediakan sebanyak 163 armada bus untuk mengangkut pemudik baik antar provinsi maupun antar kota.

KESULITAN CETAK SAWAH BARU

Pemkab Bogor Masih Berharap Swasembada Pangan

Pemkab Bogor kesulitan dalam mencetak sawah dan perkebunan, seiring migrasi dan lahirnya penduduk di Bumi Tegar Beriman, hingga kebutuhan akan pemukiman baru meningkat.

CIBINONG (IM) - Pemkab Bogor kesulitan dalam mencetak sawah dan perkebunan, seiring migrasi dan lahirnya penduduk di Bumi Tegar Beriman, hingga kebutuhan akan pemukiman baru meningkat.

Namun, mereka tetap memiliki rencana jangka panjang, agar bisa meningkatkan hasil

produksi pertanian, holtikultura dan perkebunan, sambil berharap bisa melakukan swasembada pangan ditengah ancaman kenaikan harga dan kelangkaan pangan. "Kalau mencetak sawah dan kebun itu agak sulit, paling Pemkab Bogor dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru bisa menjaga lahan

pertanian yang eksisting," ujar Plh Sekda Kabupaten Bogor, Suryanto Putra kepada wartawan, Selasa (26/3).

Melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mereka pun mulai mencetak sawah dan perkebunan, lalu juga ada upaya meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan.

Pemkab Bogor kesulitan dalam mencetak sawah dan perkebunan, seiring migrasi dan lahirnya penduduk di Bumi Tegar Beriman, hingga kebutuhan akan pemukiman baru meningkat. "Kami membantu kelompok pertanian dengan pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk

dan lainnya hingga walaupun lahan sawah da kebun terbatas, hasil panennya bisa maksimal," sambung Suryanto Putra.

Selain itu, Pemkab Bogor, tutur Suryanto Putra juga sudah melirik lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) terutama yang terlantar untuk dijadikan lahan pertanian. "Lahan HGU dan HGB terlantar bisa dijadikan lahan pertanian dan perkebunan, minimal ketika HGU dan HGBnya mau diperpanjang, sebagian kecil harus didistribusikan ke Pemkab Bogor dan masyarakat," tuturnya.

Ia menjelaskan

pencetakan sawah dan kebun baru, pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk dan lainnya sangat penting agar Kabupaten Bogor bisa swasembada pangan.

Apalagi, hampir setiap tahun, terjadi inflasi pangan hingga pemerintah daerah harus kreatif dan inovatif dalam menangani ancaman atau potensi kenaikan harga pangan tersebut. "Upaya pencetakan sawah dan kebun baru, pengadaan sarana prasarana, bibit, pupuk dan lainnya ini demi meningkatkan produksi pertanian, holtikultura dan perkebunan. Ini merupakan rencana jangka panjang," jelas Suryanto Putra. ● gio

Buih Sungai Ciliwung Sudah Hilang, Tapi Tetap Berisiko Mengendap di Tanah

BOGOR (IM) - Sungai Ciliwung menjadi salah satu sungai yang paling tercemar di Indonesia. Terbaru, titik aliran sungai Ciliwung di Kedung Halang, Kota Bogor, tercemari oleh limbah yang menimbulkan buih dan busa.

River Defender sekaligus Anggota Satuan Tugas Naturalisasi Ciliwung Kota Bogor, Suparno Jumar, menjelaskan bahwa buih atau busa di aliran sungai Ciliwung pertama kali ditemukan pada Sabtu (23/3).

Setelah melakukan investigasi bersama stakeholder lainnya, buih tersebut diduga berasal dari sebuah gudang yang terletak di kawasan Kedung Halang.

"Menurut sampel yang kami ambil di sungai, diindikasikan bahwa titik sumber limbah itu berasal dari gudang yang menjadi tempat penyimpanan barang. Di gudang itu tersimpan dirigen, kantong plastik, dan cairan-cairan," kata Suparno, Selasa (26/3).

Menurut dia, saat ini buih-buih tersebut sudah tidak terlihat lagi. Namun bagaimanapun, limbah tersebut berisiko mengendap ke dalam tanah atau dasar sungai, juga men-

galir ke bagian hilir Sungai Ciliwung.

Lebih lanjut Suparno juga mengatakan bahwa limbah tersebut berpotensi berbahaya bagi lingkungan, hingga kesehatan hewan dan manusia. Itu bisa dilihat dari beberapa ekor ikan yang ditemukan mati di tepi sungai.

"Uji lab saat ini masih dilakukan dan hasilnya belum keluar. Tapi yang jelas, kematian ikan-ikan di aliran sungai Ciliwung bisa menjadi bukti bahwa limbah tersebut berbahaya," tegas Suparno.

Karena masalah ini, Suparno pun mendesak agar

pemerintah secara tegas mem-

berikan sanksi baik itu berupa denda maupun pidana terhadap para pencemar. Menurut dia, penerapan sanksi terhadap para pencemar masih belum optimal dan memberikan efek jera.

"Memang harus ada efek yang membuat pelaku itu jera. Kalau sanksinya berat, maka tidak akan ada yang mau mencemari sungai seperti itu lagi ke depannya," kata Suparno.

Selain itu, Suparno juga mendorong agar masyarakat turut serta melakukan pengawasan. Karena menurut

dia, kepedulian dan pengawasan yang kuat dari masyarakat bisa mencegah aksi-aksi pencemaran di sepanjang aliran sungai Ciliwung.

"Saya lihat masyarakat itu kepeduliannya kurang, mereka sering kali abai, berpikiran 'yang penting gue enggak kena'.

Padahal kalau sungai sudah tercemar, yang terdampak juga masyarakat. Jadi saya mohon masyarakat agar bisa lebih aktif melaporkan kalau ada aktivitas yang mencurigakan," kata Suparno. ● pra

Sampah Berserakan, Pengelola Wisata Leuwihejo tak Indahkan Lingkungan

BOGOR (IM) - Permasalahan sampah dampak dari bisnis wisata yang memanfaatkan panorama alam belum ditanggapi serius oleh pihak-pihak pengelola di kawasan perbatasan Desa Cibadak dan Desa Karang Tengah, Kabupaten Bogor.

Secara geografis letak kawasan ini berada di ketinggian sekitar 500 mdpl sampai 800 mdpl yang merupakan kawasan pegunungan dan perbukitan. Pantauan di sepanjang Kawasan permukiman penduduk, belum ditemukan adanya aktifitas pengelolaan sampah dengan benar. Sehingga sampah berserakan berserakan di tempat yang tidak semestinya.

Termasuk di lokasi wisata dan resort yang pada umumnya sampah yang dihasilkan dari aktifitas wisata cenderung dibakar atau ditimbun tanpa proses pemilahan sampah organik dan nonorganik.

Demikian halnya keberadaan sampah yang belum dikelola secara benar dan adanya pohon yang dipaku yang berada di area wisata alam Curug Leuwihejo belum kunjung ditanggapi oleh pihak pengelola yang sehari-hari bertugas di lokasi wisata tersebut.

Selaku pamong warga,

Ketua RW 011 Desa Karang Tengah, Nce mengatakan permasalahan lingkungan hidup dan sampah di lingkungan wilayahnya belum terwujud program pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah yang memadai.

"Sejak dirinya menjabat sebagai Ketua RW 011 selalu memberikan pencerahan kepada warga tentang kebersihan, bahkan kami rutin kerja bakti. Meski memang masih ada yang membuang sampah disembarang tempat atau Sungai dan yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup disekitarnya," ungkap Nce, Selasa (26/3).

Ia mengatakan saat ini warga yang membuang sampah sembarang sudah berkurang. Tapi, sampah rumah tangga tersebut belum dikelola secara benar. "Kami berharap ada pihak yang memfasilitasi tempat pembuangan dan pengolahan sampah (TPS), supaya sampah yang menumpuk tidak dibakar atau ditimbun tanah," harapnya.

Disinggung adanya tempat wisata di wilayahnya, ia mengaku sudah menyampaikan keinginannya untuk bekerjasama mewujudkan TPPS. Ia juga selalu mendorong pengelola wisata maupun pengelola obyek wisata alam untuk bekerja sama dalam menge-

lola sampah supaya kelestarian lingkungan sekitar hutan dan sungai dapat terjaga.

"Kita sudah pernah bahas dengan pengelola wisata untuk rencana TPPS. Selain itu saya juga sudah coba komunikasi dengan pengelola obyek wisata alam Leuwihejo tapi sampai saat ini belum ada kejelasan dari pengelola Leuwihejo," bebernya.

Kesiapan pengurus RW 011 Desa Karang Tengah itu ditangkap oleh Pendamping Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bogor wilayah Kecamatan Babakan Madang, Wiji Suparno.

"Saya sangat prihatin dengan adanya tumpukan sampah yang berada di lokasi wisata, kuliner maupun warung/kantin yang belum dikelola dengan baik dan benar. Saya mengajak supaya setiap pengelola wisata dan kuliner menyiapkan tempat sampah organik dan an organik agar bisa di manfaatkan kembali," ajaknya.

Ia memberikan contoh, sampah organik bisa dibuat pupuk kompos atau makan ternak magot lalat BSF, sedangkan sampah an organik bisa didaur ulang yang hasilnya bisa dimanfaatkan warga karena semua sampah bisa bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Sementara, PT Palawi Manajer Site Bogor, Dar-

mono menyesalkan adanya informasi keberadaan sampah yang berserakan di kawasan wisata alam Curug Leuwihejo yang diduga akibat kelalaian pedagang dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Termasuk adanya banner promo yang dipaku di pohon. "Silakan konfirmasi ke pihak kami yang sehari-harinya bertugas di Leuwihejo pak," ujarnya, Minggu (18/3)

kemarin. Saat dikonfirmasi, pihak pengelola obyek wisata alam Curug Leuwihejo maupun pihak Koperasi yang berada di bawah naungan PT Palawi, hingga berita ini dimuat, belum memberikan tanggapan terkait pengelolaan sampah wisata maupun kondisi lingkungan hidup dilokasi bisnisnya. ● gio



Pengelola wisata Leuwihejo, tak indahkan lingkungan.

KEHILANGAN	
Telah hilang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	
Atas nama	: Ririn Siswanti
Nomor pol	: F 5338 NR
Warna	: Merah hitam
Merek	: Honda Vario
Tahun	: 2012
Nomor Mesin	: JF 91E1643886
Nomor Rangka	: MH 1JF 9119CK646400
Alamat	: Puri Alam Kencana Blok J No 10 RT 06/07 Cibinong Bogor
Hilang	: 28 Februari 2024